



LAPORAN KINERJA

BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN APARATUR



TRIWULAN I TAHUN 2026

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun 2026 di Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BPPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat terlaksana dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), juga sebagai bahan informasi capaian kinerja yang dilaksanakan oleh BPPA pada tahun 2026. Diharapkan melalui laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Demikian laporan ini kami sampaikan dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai capaian kinerja yang dilaksanakan oleh BPPA, sehingga dapat mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan anggaran.

Subang, 16 April 2026

Plh, Kepala Balai Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur KP,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sudharmono, S.Pi, M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	5
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. Latar Belakang.....	9
1.2. Maksud dan Tujuan.....	10
1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	10
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)	11
1.5. Potensi dan Permasalahan.....	12
1.6. Sistematika Laporan Kinerja.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1. Rencana Strategis	16
2.1.1. Visi	16
2.1.2. Misi	17
2.1.3. Tujuan.....	17
2.1.4. Sasaran Kegiatan	17
2.1.5. Rencana Kerja Tahun 2026	19
2.2. Perjanjian Kinerja BPPA Tahun 2026	19
2.3. Pengukuran Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
3.2. Keberhasilan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026	23
3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	24
BAB IV PENUTUP	52
1.1. Capaian Kinerja Utama.....	53
1.2. Permasalahan dan Rekomendasi	54
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana kerja tahun 2026	19
Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPPA Januari Tahun 2026	20
Tabel 3. Capaian NKO tahun 2025 dan 2026.....	23
Tabel 4. Capaian Kinerja BPPA Triwulan I Tahun 2026.	25
Tabel 5. Perbandingan capaian target IKS.01.01 periode sekarang dan sebelumnya.	27
Tabel 6. Perbandingan capaian target IKS. 02.1 periode sekarang dan sebelumnya....	28
Tabel 7. Perbandingan capaian target IKS. 01.03 periode sekarang dan sebelumnya. 32	
Tabel 8. Perbandingan capaian target IKS. 01.04 periode sekarang dan sebelumnya.	33
Tabel 9. Perbandingan capaian target IKS. 01.05 periode sekarang dan sebelumnya. 34	
Tabel 10. Perbandingan capaian target IKS. 01.07 periode sekarang dan sebelumnya.	35
Tabel 11. Perbandingan realisasi Nilai PNB triwulan I Tahun 2026 dengan UPT Lingkup BPPSDMKP.	36
Tabel 12. Perbandingan capaian target IKS. 02.01 dengan periode sebelumnya.....	40
Tabel 13. Perbandingan realisasi Persentase layanan dukungan manajemen internal dengan UPT Lingkup BPPSDM KP.	41
Tabel 14. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan.	44
Tabel 15. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BDA Sukamandi (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP.	45
Tabel 16. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPA Sukamandi (%).	47
Tabel 17. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPPSDMKP.	48
Tabel 18. Capaian Kinerja BPPA Tahun TW I Tahun 2026.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPPA	11
Gambar 2. Keragaan pegawai BPPA menurut golongan kepangkatan.....	12
Gambar 3. Keragaan pegawai BPPA menurut jabatan.	12
Gambar 4. Sistem aplikasi kinerjaku.	23

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Triwulan I Tahun 2026, Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BPPA) Sukamandi berhasil mencapai target kinerja dengan hasil yang istimewa. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 116,07, naik 1,07 poin dibandingkan capaian periode yang sama tahun 2025 sebesar 115,00% sehingga masuk kategori Istimewa (Biru).

Pada aspek output dan layanan utama, realisasi PNPB mencapai 120% dari target, yang mencerminkan efektivitas pengelolaan layanan dan peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan. Demikian pula pada pengembangan kompetensi aparatur, Jumlah aparatur KP yang dilatih mencapai 120% dari target, menandakan tingginya partisipasi aparatur KP serta keberhasilan transformasi pembelajaran berbasis digital dan fleksibel. Kinerja ini memperlihatkan bahwa BDA Sukamandi mampu merespons kebutuhan pengembangan SDM secara adaptif dan efisien.

Dari sisi tata kelola dan penguatan kelembagaan, capaian indikator juga menunjukkan hasil yang sangat positif. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPA Sukamandi mencapai 118,52% dari target, menggambarkan meningkatnya peran strategis BDA Sukamandi sebagai pusat layanan dukungan manajemen.

Selanjutnya, pada aspek akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya, kinerja BDA Sukamandi juga berada pada kategori sangat baik. Pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan mencapai 100%, mencerminkan komitmen kuat terhadap perbaikan berkelanjutan. Serta pengumuman RUP pada SIRUP masing-masing mencapai 120%, Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa BDA Sukamandi tidak hanya berhasil memenuhi target kinerja, tetapi juga memperlihatkan praktik tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Terdapat kendala berupa kelengkapan dan penataan data dukung yang belum optimal. Hal ini dapat berdampak pada keterlambatan penyusunan laporan dan potensi ketidaksesuaian data dalam proses evaluasi kinerja.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, direkomendasikan agar BPPA Sukamandi memperkuat sistem pengelolaan data melalui standarisasi format

dan tata kelola, pemanfaatan aplikasi atau sistem informasi pengarsipan digital, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang pengelolaan data dan dokumentasi. Selain itu, diperlukan monitoring dan evaluasi rutin agar data dukung selalu diperbarui dan siap digunakan untuk mendukung penyusunan laporan yang akurat dan tepat waktu.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 mencerminkan keberhasilan BPPA Sukamandi dalam melaksanakan program pengembangan SDM kelautan dan perikanan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan arah kebijakan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BPPA) Sukamandi Triwulan I Tahun 2026 merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari penerapan prinsip *Good Governance*, khususnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan sumber daya kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan, baik untuk aparatur lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun aparatur instansi pemerintah lainnya. Pendirian BPPA bertujuan mendukung tersedianya aparatur yang kompeten, baik pada level manajerial melalui pelatihan kepemimpinan maupun pada level teknis melalui pelatihan fungsional dan teknis perikanan.

Melalui penyusunan laporan kinerja ini, BPPA memenuhi kewajiban untuk: (1) melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian misi dan tujuan organisasi, dan (2) menyampaikan laporan kinerja internal kepada pimpinan unit organisasi Eselon I sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja di periode berikutnya.

Selain menjadi sarana pertanggungjawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai instrumen pembelajaran organisasi untuk menilai efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi yang diperoleh akan digunakan sebagai dasar penyempurnaan strategi pelatihan, peningkatan tata

kelola kelembagaan, dan penguatan kapasitas SDM, sehingga diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja BPPA triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja BPPA triwulan I Tahun 2026 ini bertujuan :

- a) Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada BPPA triwulan I Tahun 2026;
- b) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPPA triwulan I Tahun 2026 untuk meningkatkan kinerjanya sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja di triwulan berikutnya

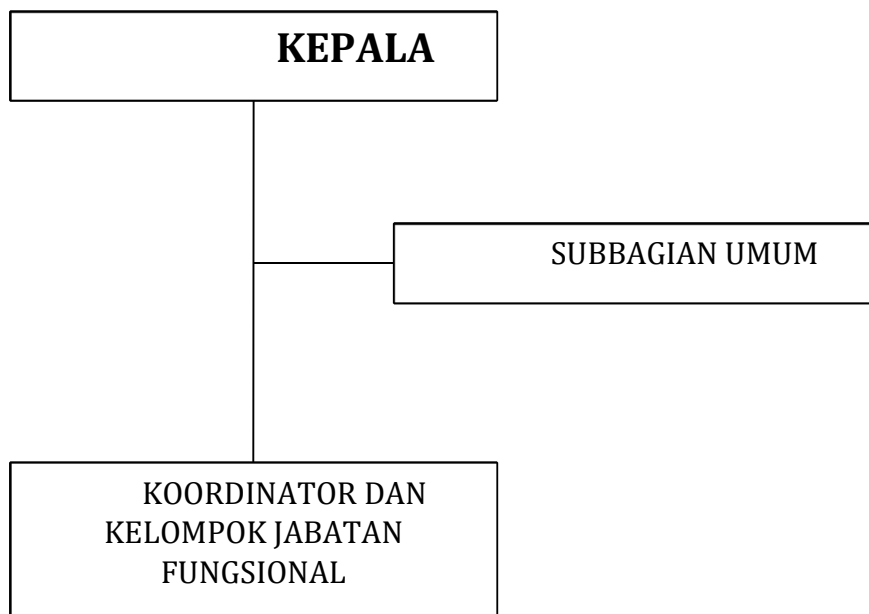
1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 86/PERMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, BPPA dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan yang menangani pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial di bidang pengembangan aparatur. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPPA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur;
- b. Pelaksanaan pelatihan teknis dan manajerial di bidang aparatur;
- c. Penyusunan dan pengembangan materi, metodologi, dan penyelenggaraan pelatihan;
- d. Pelayanan administrasi dan penyediaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- e. Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan; dan

f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Struktur organisasi BPPA KKP sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 86/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, adalah sebagaimana terdapat pada Gambar 1.



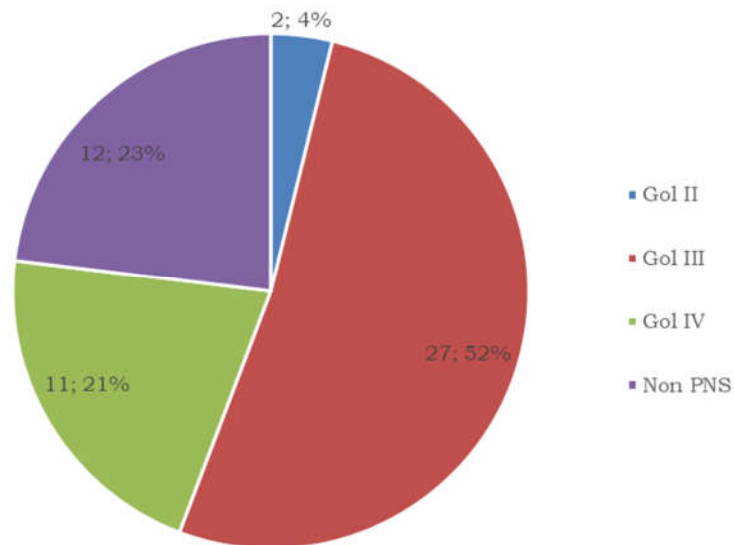
Gambar 1. Struktur Organisasi BPPA

Dalam rangka memenuhi tugas organisasi, BPPA melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan diklat sebagai berikut :

- a) Pelatihan Manajerial.
- b) Pelatihan Dasar CPNS.
- c) Pelatihan Teknis dan Sosial Kultural.

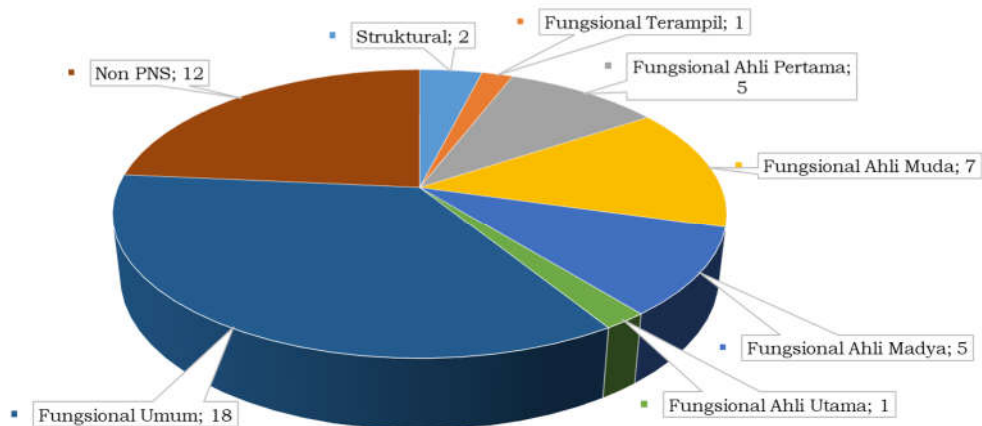
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pegawai Balai Diklat Aparatur pada tahun 2026 berjumlah 40 orang PNS dan 12 orang non PNS. Jumlah pegawai BPPA menurut golongan kepangkatan terdiri dari 11 orang pegawai golongan IV, 26 orang pegawai golongan III dan 2 orang pegawai golongan II (Gambar 2).



Gambar 2. Keragaan pegawai BPPA menurut golongan kepangkatan.

Sedangkan menurut jabatan, pegawai BPPA terdiri dari 2 orang pejabat struktural, 19 orang pejabat fungsional tertentu, 18 orang pegawai fungsional umum dan 12 orang pegawai non PNS (Gambar 3).



Gambar 3. Keragaan pegawai BPPA menurut jabatan.

1.5. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BPPA) Sukamandi memiliki berbagai potensi yang mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) kelautan

dan perikanan. Potensi ini mencakup sarana prasarana, sumber daya penunjang pelatihan, kerja sama kelembagaan, serta inovasi digital dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan.

1) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

BPPA Sukamandi memiliki aset berwujud berupa gedung perkantoran, ruang kelas, asrama, workshop, laboratorium komputer, dan sarana praktik pembelajaran. Sarana ini dirancang untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelatihan aparatur, baik pada aspek manajerial maupun teknis. Selain itu, BPPA juga memiliki aset tak berwujud yang mendukung peningkatan kinerja organisasi, seperti basis data, perangkat lunak learning management system (LMS) E-Milea, akreditasi lembaga maupun program pelatihan serta sertifikasi manajemen mutu ISO 9001 : 2015. Adapun lahan yang digunakan merupakan tanah milik negara seluas 35.751 m² yang telah bersertifikat dan difungsikan sebagai fasilitas pendukung penyelenggaraan pelatihan.

2) Sumber Daya Penunjang Lainnya

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan, BPPA telah menyusun kurikulum pelatihan yang mencakup pelatihan teknis dan fungsional, serta modul pelatihan untuk mendukung berbagai jenis kegiatan pengembangan kompetensi. Selain itu, BPPA Sukamandi juga menyelenggarakan pelatihan bertaraf internasional sesuai konvensi STCW-F (*International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel*) 1995 yang dikeluarkan oleh International Maritime Organization (IMO). Pelatihan ini mencakup:

- Diklat IMO Model Course 3.12 dan 6.09 untuk pelatih dan penguji, dengan sasaran guru, dosen, widyaiswara, dan instruktur;
- Diklat IMO Model Course 6.10 untuk simulator;

Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur secara konsisten membangun jejaring kerja sama yang luas dengan pemerintah daerah, kementerian, dunia industri, serta institusi pendidikan dan pelatihan, lembaga non pemerintah (NGO) baik di dalam maupun luar negeri. Kolaborasi ini memperkuat kapasitas lembaga dalam menyediakan pelatihan yang relevan, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan industri

serta dinamika pembangunan kelautan dan perikanan.

3) Sasaran Pelatihan Kelautan dan Perikanan (KP)

Selama periode 2017–2026, BPPA telah menyelenggarakan berbagai program pelatihan yang mendukung program prioritas nasional dan KKP, serta program prioritas lainnya yang berorientasi pada keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.

4) Digitalisasi Pelatihan

Sebagai bentuk inovasi, BPPA telah mengimplementasikan digitalisasi pelatihan melalui pengembangan aplikasi E-Milea. Aplikasi ini dibangun bekerja sama dengan Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin) KKP. Platform E-Milea memungkinkan penyelenggaraan pelatihan jarak jauh dengan cakupan wilayah yang luas, biaya lebih efisien, terakreditasi, fleksibel dari sisi waktu, dan mampu melayani peserta dalam jumlah besar. Inovasi ini menunjukkan komitmen BPPA dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan akses dan kualitas pelatihan aparatur kelautan dan perikanan.

b. Permasalahan

Permasalahan dalam pengembangan SDM-KP khususnya yang dihadapi Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan diantaranya:

1. Kebutuhan akan tenaga pelatih (widyaiswara) yang belum semua memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang pelatihan yang diampu;
2. Penyediaan kurikulum/modul Pelatihan belum sepenuhnya terstandarisasi sehingga diperlukan standarisasi kurikulum/modul pelatihan.

1.6. Sistematika Laporan Kinerja

Dasar yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja BPPA Sukamandi pada Tahun 2026 adalah :

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Peraturan Perundangan-undangan Nomor 08 Tahun 2016 tentang pelaporan

- Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja.
 - e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 53 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Adapun sistematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala sampai dengan Triwulan I tahun 2026
2. **Bab I - Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan, gambaran organisasi, aspek strategis organisasi, seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan SDM.
3. **Bab II - Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis tahun 2026 - 2029, Rencana Kinerja dan Penetapan kinerja Tahun 2026, serta metode Pengukuran Kinerja menyajikan Rencana Strategis dan perjanjian kinerja tahun 2026;
4. **Bab III - Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada Laporan Kinerja BPPA KKP disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya, serta Akuntabilitas Keuangan menyajikan hasil analisis terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan;
5. **Bab IV - Penutup**, menyajikan kesimpulan terhadap pencapaian kinerja, permasalahan dan rekomendasi;
6. **Lampiran**, berisi lampiran PK Tahun 2026.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berkontribusi terhadap terwujudnya SDM kelautan dan perikanan yang inovatif, kompeten dan berdaya saing untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KKP sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) berkontribusi pada visi tersebut melalui pelatihan aparatur sesuai dengan tugas dan fungsi BPPA.

2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam rancangan RPJMN yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut menekankan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan Indonesia menjadi setara dengan negara maju dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang

Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”

2.1.2.Misi

Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan sebagai berikut :

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Kelautan dan Perikanan“ yang melaksanakan Asta Cita 4;
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

Dalam melaksanakan misi KKP ke 3 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” BPPSDMKP menetapkan misi “Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten dan Berdaya Saing di Tingkat Nasional dan Internasional.” Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mendukung misi tersebut melalui pengembangan kompetensi di bidang aparatur kelautan dan perikanan.

2.1.3.Tujuan

Tujuan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KKP merupakan penjabaran dari visi dan misi KKP yang juga berdasarkan tujuan BPPSDMKP. Untuk itu tujuan BPPA KKP adalah menghasilkan SDM aparatur yang kompeten dalam rangka mendukung program nasional, dengan indikator tujuan adalah:

- a. Terlatihnya aparatur KP melalui metode blended learning;
- b. Terlatihnya aparatur KP melalui metode full learning;
- c. Tersedianya tenaga pelatihan yang kompeten;
- d. Lembaga/ instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan peningkatan kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan.

2.1.4.Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan BPPA merupakan penjabaran Visi dan Misi pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang tersusun kedalam 2 (dua) sasaran kegiatan yakni:

1. SK 01 Aparatur Yang Dididik dan Dilatih
2. SK 02 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Penjabaran indikator pada masing-masing sasaran kegiatan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 adalah Aparatur Yang Dididik dan Dilatih :

1. Persentase aparatur KKP yang menerapkan kompetensi hasil pelatihan di BPPA Sukamandi (%) dengan target 75 %;
2. Jumlah aparatur KP yang dilatih (orang) dengan target 4.620 orang;
3. Naskah perangkat pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan (Dokumen) dengan target 1 Dokumen;
4. Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPA Sukamandi (Dokumen) dengan target 1 Dokumen;
5. Tenaga Pelatihan yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi sesuai standar (Orang) dengan target 15 Orang;
6. Jumlah Program Pembelajaran Berbasis Corporate University yang Dilaksanakan oleh BPPA Sukamandi (Program) dengan target 7 Program;
7. Nilai PNBP Satker BPPA Sukamandi (Rupiah Miliar) dengan target 0.06 Miliar.

Sasaran Kegiatan 2 adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan :

1. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPA Sukamandi (%) dengan target 100 %;
2. Indeks Profesionalitas ASN BPPA Sukamandi (indeks) dengan terget 83 indeks;
3. Penilaian Mandiri SAKIP BPPA Sukamandi (Nilai) dengan target 81 Nilai;

4. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPA Sukamandi (%) dengan target 86 %;
5. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPA Sukamandi (%) dengan target 77 %
6. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPA Sukamandi (Nilai) dengan target 71 Nilai;
7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPA Sukamandi (Nilai) dengan target 92 Nilai;
8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPA Sukamandi (Nilai) dengan target 71,5%.

2.1.5. Rencana Kerja Tahun 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan Sasaran Kegiatan, maka Rencana Kerja BPPA Tahun 2026 menetapkan program yaitu kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan rincian kegiatan sebagaimana terlampir pada Tabel 1.

Tabel 1. Rencana kerja tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Pagu Aktif (Rp)
1	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	5.000.000.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8.429.809.000
Total Anggaran		13.429.809.000

2.2. Perjanjian Kinerja BPPA Tahun 2026

Dalam rangka mengukur keberhasilan dari implementasi rencana strategis tahun 2026, BPPA menetapkan target IKU untuk masing-masing sasaran kegiatan yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2026 berbasis *logical framework*.

Logical Framework Analysis (LFA) adalah instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan

hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (*output*) dan hasil (*outcomes*), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek.

Pada bulan Januari 2026 BPPA menetapkan perjanjian kinerja antara Kepala Pusat Pelatihan KP dan Kepala BPPA sebagaimana tersaji pada tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPPA Januari Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target 2026
1	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	1	Persentase aparatur KKP yang menerapkan kompetensi hasil pelatihan di BPPA Sukamandi (%)	75
		2	Jumlah aparatur KP yang dilatih (orang)	4.620
		3	Naskah perangkat pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	1
		4	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPA Sukamandi (Dokumen)	1
		5	Tenaga Pelatihan yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi sesuai standar (Orang)	15
		6	Jumlah Program Pembelajaran Berbasis Corporate University yang Dilaksanakan oleh BPPA Sukamandi (Program)	7
		7	Nilai PNBP Satker BPPA Sukamandi (Rupiah Miliar)	0.06
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPA Sukamandi (%)	100
		9	Indeks Profesionalitas ASN BPPA Sukamandi (indeks)	83
		10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPA Sukamandi (Nilai)	80
		11	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPA Sukamandi (%)	86
		12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPA Sukamandi (%)	77
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPA Sukamandi (Nilai)	71
		14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPA Sukamandi (Nilai)	92

15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPA Sukamandi (Nilai)	71,5
----	---	------

2.3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses dimana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akusisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar dibalik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum. Pengukuran Kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Pengukuran capaian kinerja BPPA Tahun 2026, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada manual IKU pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen. Perhitungan Indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian indikator kinerja adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capain IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



Metode pengukuran kinerja lingkup BPPA dilakukan secara berkala per

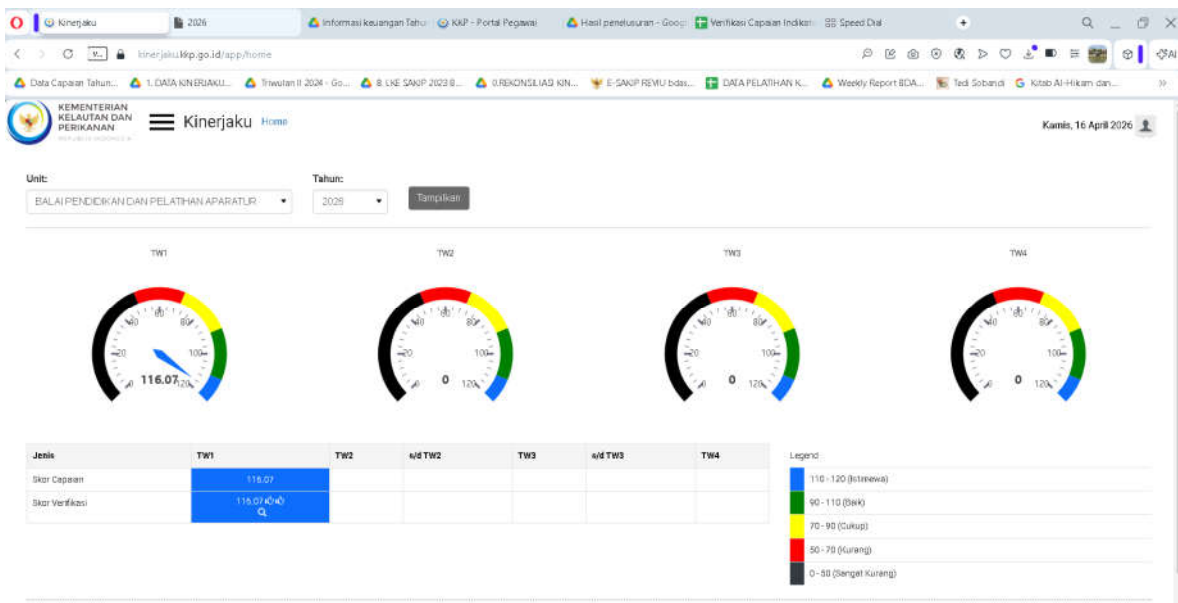
triwulan. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja Triwulanan dipantau oleh Tim Teknis Kelola Kinerja yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada kepala Balai. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Kepala Balai c.q. Kelompok Kerja Program dan Monev merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BPPA triwulan I tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja utama. Pencatatan dan pengukuran menggunakan sistem aplikasi pengelolaan kinerja yang dapat diakses melalui situs www.kinerjaku.kkp.go.id (Gambar 4).



Hasil pengukuran capaian kinerja ditunjukkan oleh Nilai Kinerja Organisasi Gambar 4. Sistem aplikasi kinerjaku.

hasil pengukuran kinerja, tampak bahwa pada triwulan I tahun 2026 BPPA KKP berhasil mencapai target kinerja dengan kategori istimewa (biru). Dibandingkan dengan NKO Triwulan I Tahun 2025 (115,00%), capaian Triwulan I tahun 2026 mengalami kenaikan 1,07 % dari capaian NKO pada akhir Triwulan I Tahun 2026 (Tabel 4).

Tabel 3. Capaian NKO tahun 2025 dan 2026.

Tahun	NKO TW I	NKO TW II	NKO TW III	NKO TW IV
2024	115,00	117,80	106,03	115,32
2026	116,07			

3.2. Keberhasilan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Capaian kinerja BPPA pada Triwulan I tahun 2026 menunjukkan performa organisasi yang sangat baik. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 116,07%, yang berada dalam kategori istimewa (biru). Capaian ini tidak hanya memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, tetapi juga melampauinya secara signifikan, mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya (Triwulan I tahun 2025) yang berada pada angka 115,00%, terdapat kenaikan sebesar 1,07 %. Kenaikan ini menggambarkan bahwa BPPA mampu menjaga tren positif dalam pengelolaan kinerja.

Hasil ini menjadi indikasi bahwa langkah-langkah perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang diterapkan selama Triwulan I tahun 2026 berjalan efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan serta produktivitas organisasi. Dengan capaian tersebut, BPPA KKP tidak hanya berhasil mempertahankan reputasinya sebagai unit kerja dengan kinerja unggul, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas kinerja.

3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi nasional. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2026 dapat tercapai.

Pendekatan Analisis Capaian Kinerja Organisasi sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 menetapkan tinjauan-tinjauan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026 pada BPPA Sukamandi sebagaimana terdapat pada tabel 5 berikut.

Tabel 4. Capaian Kinerja BPPA Triwulan I Tahun 2026.

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Target Apr	Capaian Apr	% Terhadap Capaian
SK.01. Aparatur Yang Dididik dan Dilatih						
IKSK.01.01	Persentase aparatur KKP yang menerapkan kompetensi hasil pelatihan di BPPA Sukamandi (%)	%	75			
IKSK.01.02	Jumlah aparatur KP yang dilatih (orang)	Orang	4.620	1000	1.298	120
IKSK.01.03	Naskah perangkat pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	Dokumen	1			
IKSK.01.04	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPA Sukamandi (Dokumen)	Dokumen	1			
IKSK.01.05	Tenaga Pelatihan yang mengikuti kegiatan	Orang	15			

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Target Apr	Capaian Apr	% Terhadap Capaian
	pengembangan kompetensi sesuai standar (Orang)					
IKSK.01.06	Jumlah Program Pembelajaran Berbasis Corporate University yang Dilaksanakan oleh BPPA Sukamandi (Program)	Program	7			
IKSK.01.07	Nilai PNBP Satker BPPA Sukamandi (Rupiah Miliar)	Rupiah Miliar	0,06	0,03	0,66	120
SK.02. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan						
IKSK.02.01	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPA Sukamandi (%)	%	100	25	29,63	118,52
IKSK.02.02	Indeks Profesionalitas ASN BPPA Sukamandi (indeks)	Indeks	83			
IKSK.02.03	Penilaian Mandiri SAKIP BPPA Sukamandi (Nilai)	Nilai	81			
IKSK.02.04	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPA Sukamandi (%)	%	86	86	86	100
IKSK.02.05	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPA Sukamandi (%)	%	77	77	100	120
IKSK.02.06	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPA Sukamandi (Nilai)	Nilai	71			
IKSK.02.07	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPA Sukamandi (Nilai)	Nilai	92			
IKSK.02.08	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPA Sukamandi (Nilai)	Nilai	71,5			

Sasaran Kegiatan 1 (SK.01) Aparatur Yang Dididik dan Dilatih

Untuk mewujudkan sasaran kegiatan ini, pencapaiannya didukung dengan indikator kinerja utama (IKU) sebanyak 7 IKU. Adapun capaian sasaran kegiatan tersebut dapat diraih dari capaian indikator sebagai berikut.

IKSK.01.01 Persentase aparatur KKP yang menerapkan kompetensi hasil pelatihan di BPPA Sukamandi (%)

Indikator Kinerja Sasaran (IKSK.01.01) 01.01 – Persentase aparatur KKP yang menerapkan kompetensi hasil pelatihan di BPPA Sukamandi merupakan IKU baru di tahun 2026 ini dirancang untuk mengukur jumlah aparatur yang berhasil meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya melalui program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi profesional. Peningkatan kompetensi ini diharapkan dapat menghasilkan tenaga pelatihan yang lebih efektif, efisien, dan profesional dalam mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik dan kebijakan pemerintah, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Pada tahun 2026, capaian indikator ini difokuskan pada Indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mampu mengimplementasikan kompetensi yang diperoleh selama mengikuti pelatihan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatannya. Penerapan kompetensi dimaksud mencakup peningkatan kualitas kinerja, efektivitas pelaksanaan pekerjaan, serta kontribusi nyata terhadap pencapaian target organisasi di bidang kelautan dan perikanan. Pembuktian penerapan kompetensi dilakukan melalui dokumen sampling evaluasi pasca pelatihan dengan rumus slovin.

Capaian tahun 2026 pada IKS.01.01 akan di ukur pada Semester I dan Semester II Tahun 2026 dihitung dengan rumus Slovin, dan digunakan sebagai sampel Evaluasi Pasca Pelatihan, Jumlah lulusan pelatihan aparatur yang menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan dari data hasil evaluasi pasca pelatihan, Persentase aparatur KKP yang menerapkan kompetensi hasil pelatihan.

Persentase aparatur KKP yang menerapkan kompetensi hasil pelatihan di BPPA Sukamandi (%). Perbandingan capaian IKS.01.01 dengan periode sebelumnya tersaji pada tabel 10 berikut.

Tabel 5. Perbandingan capaian target IKS.01.01 periode sekarang dan sebelumnya.

Realisasi TW I				Tahun 2026			%	Tahun 2026	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2026	% Capaian
-	-	-	-	75			-	75	

a. Capaian Triwulan I Tahun 2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKSK.01.01) Persentase aparatur KKP yang menerapkan kompetensi hasil pelatihan di BPPA Sukamandi (%) pada Tahun 2026 akan di ukur pada Triwulan II (Semester I) dan Triwulan IV (Semester II) Tahun 2026.

IKSK.01.02 Jumlah aparatur KP yang dilatih (orang)

Pada Triwulan I Tahun 2026, Balai Diklat Aparatur KKP melaksanakan kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran (IKSK) 01.02 yang menargetkan pelatihan bagi 1000 orang peserta. Realisasi yang dicapai melebihi target, yaitu sebanyak 1.298 orang peserta atau 120% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pelatihan, khususnya melalui penerapan metode blended learning, yang memungkinkan perluasan jangkauan peserta serta peningkatan efektivitas pembelajaran. Hasil ini juga mencerminkan komitmen Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KKP dalam mendukung peningkatan kompetensi aparatur sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan.

Data capaian pada indikator ini dapat dilihat pada Tabel 8 yang menggambarkan perbandingan antara target dan realisasi pelatihan.

Tabel 6. Perbandingan capaian target IKS. 02.1 periode sekarang dan sebelumnya.

Realisasi TW I				2026 (TW I)				Tahun 2026	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% 2024-2025	Target 2025	% Capaian
				1000	960	1.298	0	4.620	120

a. Capaian triwulan I Tahun 2026

Capaian indikator kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik. Target jumlah peserta pelatihan yang telah ditetapkan sebesar 1000 orang, sedangkan realisasi mencapai 1.298 orang, atau setara dengan 120% dari target yang telah ditentukan.

Pencapaian ini memberikan gambaran bahwa pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I mampu menjangkau peserta lebih luas dari yang telah direncanakan semula, sehingga kontribusi terhadap output kinerja lembaga meningkat

signifikan. Dengan capaian ini, indikator kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 berada pada kategori sangat memuaskan sesuai standar penilaian kinerja yang berlaku.

b. Capaian Indikator dengan tahun sebelumnya

Capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKSK) 01.02 pada Triwulan I Tahun 2026, yang Jumlah aparatur KP yang dilatih (orang), menunjukkan hasil sebesar 1.298 orang. Persentase perubahan capaian antara tahun 2025 dan tahun 2026 tercatat 0%, yang menunjukkan bahwa jumlah aparatur yang dilatih tetap konsisten pada angka 1.298 aparatur, meskipun target triwulan I telah tercapai dan terlampaui.

c. Perbandingan Capaian Kinerja triwulan I Tahun 2026 dengan Target Renstra BPPA Sukamandi.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKSK) 01.02 pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari target tahun 2026 yang ditetapkan sebanyak 1000 orang Jumlah aparatur KP yang dilatih (orang), realisasi pada Triwulan I tahun 2026 mencapai 1.298 orang. Dengan capaian ini, tingkat realisasi mencapai 120% dari target triwulan I.

Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan berbasis blended learning yang mampu menjangkau lebih banyak aparatur secara fleksibel dan efisien, sekaligus menunjukkan optimalisasi pemanfaatan teknologi pembelajaran digital dalam mendukung peningkatan kompetensi aparatur. Selain itu, capaian ini menegaskan komitmen unit kerja dalam menjaga kualitas dan kesinambungan pelatihan, sehingga target kinerja tidak hanya tercapai, tetapi juga terlampaui sesuai dengan sasaran strategis pengembangan sumber daya manusia aparatur.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/ Instansi sejenis

Secara umum, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan oleh BPPA Sukamandi pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat secara langsung dibandingkan dengan standar nasional karena belum ditemukan institusi yang memiliki indikator kinerja dengan parameter yang benar-benar sepadan, khususnya terkait pelatihan aparatur dengan metode blended learning. Perbedaan metodologi pengukuran kinerja dan fokus program pada setiap

instansi menyebabkan keterbatasan dalam melakukan benchmarking yang bersifat kuantitatif dan langsung dapat dibandingkan.

Namun demikian, sebagai referensi terdapat instansi yang memiliki kesamaan dalam fungsi pembinaan sumber daya manusia, yaitu BPPSDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Instansi tersebut memiliki output berupa peningkatan kompetensi SDM aparatur lingkup LHK melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Pada tahun 2025, BPPSDM KLHK menargetkan pelatihan bagi 30 orang aparatur. Meskipun lingkup dan skala kegiatan berbeda dengan BPPA Sukamandi yang merealisasikan pelatihan 1.298 orang pada periode yang sama, perbandingan ini memberikan gambaran bahwa secara kuantitas, BPPA Sukamandi memiliki cakupan pelatihan yang jauh lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi BPPA Sukamandi terhadap peningkatan kapasitas SDM aparatur di sektor kelautan dan perikanan memiliki bobot yang signifikan dibandingkan dengan instansi sejenis yang berfokus pada sektor lain.

e. Analisis Keberhasilan / Faktor Pendukung

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) 01.02 Balai Diklat Aparatur KKP pada tahun 2026 didukung oleh beberapa faktor penting yang saling berkaitan. Inovasi dalam penyelenggaraan pelatihan melalui metode blended learning yang memanfaatkan *Learning Management System* (LMS) e-milea menjadi pendorong utama, karena memungkinkan pelatihan dilaksanakan secara fleksibel, menjangkau peserta lebih luas, serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Dukungan teknologi informasi juga memperkuat efektivitas pelatihan, memberikan kemudahan akses materi bagi peserta, dan mendorong partisipasi aktif aparatur sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi masing-masing.

Selain itu, kapasitas kelembagaan yang memadai memungkinkan BPPA KKP menyelenggarakan pelatihan dalam skala besar, melampaui target yang ditetapkan, berkat perencanaan yang matang dan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Komunikasi dan kerja sama yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, turut mendukung kelancaran pelaksanaan pelatihan. Tidak kalah penting, adanya mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan memastikan kegiatan dapat disesuaikan

secara cepat berdasarkan umpan balik, sehingga pelaksanaan pelatihan selalu sejalan dengan kebutuhan peserta dan tujuan organisasi.

Kombinasi faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan capaian kinerja bukan hanya hasil dari peningkatan jumlah peserta semata, tetapi juga mencerminkan tata kelola pelatihan yang adaptif, berbasis teknologi, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi serta aparatur yang dilatih.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Pelaksanaan pelatihan aparatur pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KKP mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Penerapan metode *blended learning* melalui pemanfaatan LMS e-milea memungkinkan sebagian besar proses pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga mengurangi kebutuhan biaya transportasi, akomodasi, dan penggunaan fasilitas fisik tanpa mengurangi kualitas pelatihan. Pemanfaatan teknologi informasi juga mendukung efektivitas penyampaian materi dan mempermudah monitoring proses belajar peserta, sehingga tenaga pengajar dapat dialokasikan secara lebih optimal.

Selain itu, pengaturan jadwal pelatihan yang terintegrasi dan pemanfaatan tenaga pengajar internal serta fasilitas pelatihan yang ada telah meminimalkan biaya tambahan sekaligus meningkatkan pemanfaatan aset yang sudah tersedia. Efisiensi ini terlihat dari kemampuan BPPA KKP menyelenggarakan pelatihan bagi jumlah peserta yang lebih besar dibandingkan target, namun dengan sumber daya yang relatif sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada pelaksanaan pelatihan triwulan I tahun 2026 telah berjalan efektif, mendukung pencapaian target kinerja tanpa membebani alokasi anggaran secara berlebihan.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Balai Diklat Aparatur KKP pada Triwulan I Tahun 2026 tidak terlepas dari implementasi program dan kegiatan yang secara langsung mendukung target indikator kinerja. Salah satu kegiatan utama adalah pelatihan aparatur dengan metode *blended learning* yang memanfaatkan LMS e-milea sebagai platform pembelajaran digital. Pendekatan ini

memungkinkan peserta untuk mengikuti pelatihan secara fleksibel, mengurangi hambatan geografis, dan menjangkau lebih banyak peserta dibandingkan metode konvensional.

Selain itu, pemanfaatan sarana prasarana pelatihan secara optimal juga menjadi faktor pendukung penting. Penggunaan fasilitas pelatihan yang ada serta infrastruktur IT, dioptimalkan untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan dengan standar mutu yang baik. Penguatan jejaring dan koordinasi dengan unit kerja di lingkup KKP juga membantu memperluas basis peserta, sehingga sasaran pelatihan dapat tercapai dengan cakupan yang lebih luas.

Kegiatan lain yang turut menunjang adalah monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap proses pembelajaran, yang memastikan kesesuaian materi dengan kebutuhan kompetensi peserta. Kombinasi dari program berbasis teknologi, pemanfaatan sumber daya internal, serta koordinasi lintas unit ini berperan besar dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja pada periode ini.

IKSK.01.03 Naskah perangkat pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan (Dokumen)

Indikator Kinerja Sasaran (IKSK) 01.03 – Naskah perangkat pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan (Dokumen) digunakan untuk Indikator kinerja yang mengukur jumlah naskah perangkat pelatihan yang disusun dan diusulkan oleh BPPA kepada Pusat, untuk dibahas lebih lanjut dan ditetapkan sebagai perangkat pelatihan resmi yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pelatihan kelautan dan perikanan. Indikator ini menunjukkan sejauh mana layanan pelatihan BPPA KKP memiliki jangkauan dan dampak yang lebih luas di tingkat nasional, khususnya bagi lembaga pemerintah daerah, instansi pendidikan, dan pihak swasta yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2026 capaian diukur pada Triwulan IV (Tahunan) sebanyak 1 Dokumen. Perbandingan capaian IKSK 01.4 dengan periode sebelumnya tersaji pada tabel 11 berikut.

Tabel 7. Perbandingan capaian target IKS. 01.03 periode sekarang dan sebelumnya.

Realisasi TW I				Tahun 2026			% kenaikan 2025-2026	Tahun 2026	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2026	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

a. Capaian Triwulan I Tahun 2026

Capaian Naskah perangkat pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan (Dokumen) akan di ukur pada Triwulan IV (Tahunan) sebanyak 1 Dokumen Capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKSK) 01.03 pada Triwulan IV Tahun 2026.

IKSK.01.04 Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPA Sukamandi (Dokumen)

Indikator Kinerja Sasaran (IKSK) 01.04 – Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPA Sukamandi (Dokumen) digunakan untuk Indikator kinerja yang mengukur Indikator ini mengukur jumlah dokumen yang memuat hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi tenaga pelatih (Instruktur/Widyaiswara) pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur sebagai dasar perencanaan program pengembangan SDM

jumlah dokumen yang memuat hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi tenaga pelatih (Instruktur/Widyaiswara) pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur sebagai dasar perencanaan program pengembangan SDM yang disusun dan diusulkan oleh BPPA kepada Pusat, untuk dibahas lebih lanjut dan ditetapkan sebagai Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPA Sukamandi. Indikator ini menunjukkan sejauh mana Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPA Sukamandi dan dampak yang lebih luas di tingkat nasional, khususnya bagi lembaga pemerintah daerah, instansi pendidikan, dan pihak swasta yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2026 capaian di ukur pada Triwulan IV (Tahunan) sebanyak 1 Dokumen. Perbandingan capaian IKSK 01.04 dengan periode sebelumnya

tersaji pada tabel 11 berikut.

Tabel 8. Perbandingan capaian target IKS. 01.04 periode sekarang dan sebelumnya.

Realisasi TW I				Tahun 2026			% kenaikan 2025-2026	Tahun 2026	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2026	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

b. Capaian Triwulan I Tahun 2026

Capaian Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPA Sukamandi (Dokumen) akan di ukur pada Triwulan IV (Tahunan) sebanyak 1 Dokumen pada tahun 2026.

IKSK.01.06 Jumlah Program Pembelajaran Berbasis Corporate

University yang Dilaksanakan oleh BPPA Sukamandi (Program)

Indikator Kinerja Sasaran (IKSK) 01.06 Indikator ini mengukur jumlah program pembelajaran berbasis model Corporate University (Corpu) dalam penyelenggaraan pembelajaran dan pengembangan kompetensi pegawai Suatu unit kerja dinyatakan “mengimplementasikan model Corpu” apabila telah memenuhi minimal 3 dari 5 kriteria implementasi, yaitu:

1. Melaksanakan Program Pembelajaran Berbasis Corpu. Misal case-based learning, projectbased learning, coaching clinic, atau pembelajaran berbasis masalah riil unit.
2. Menggunakan LMS / Platform Digital Pembelajaran untuk dokumentasi learning activity. Uploadmateri, daftar hadir, forum diskusi, atau laporan pembelajaran.
3. Mengisi dan Melaporkan Monitoring Implementasi Corpu secara berkala kepada Pusat Pelatihan. Memastikan progress implementasi dapat dilacak.

Pada tahun 2026 capaian di ukur pada Triwulan I Target IKS. 01.06 ini sebanyak 7 Program pada tahun 2026. Perbandingan capaian IKS. 01.06 dengan periode sebelumnya tersaji pada tabel 10 berikut.

Tabel 9. Perbandingan capaian target IKS. 01.05 periode sekarang dan sebelumnya.

Realisasi TW I				Tahun 2026			% 2025-2026	Tahun 2026	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2026	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	7	

b. Capaian Triwulan I Tahun 2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKSK) 01.06 pada Tahun 2026 akan diukur pada triwulan IV dan pada triwulan I ini masih dalam tahap idenstifikasi jenis-jenis progam Pembelajaran Berbasis Corporate University yang aka dilaksanakan oleh BPPA Sukamandi tahun 2026.

IKSK. 01.07. Nilai PNBP Satker BPPA Sukamandi (Rupiah Miliar)

Indikator ini menunjukkan jumlah pendapatan negara bukan pajak yang disetorkan oleh BPPA KKP pada triwulan I tahun 2026. Secara umum PNBP BPPA KKP didapatkan dari penggunaan fasilitas oleh pihak ketiga / instansi lain serta dari fasilitasi pelatihan dengan peserta dari instansi luar KKP. Target PNBP tahun 2026 Rp. 60.000.000,- Capaian pada indikator ini tersaji pada tabel 6.

Tabel 10. Perbandingan capaian target IKSK. 01.07 periode sekarang dan sebelumnya.

Realisasi TW I				2026 (TW I)					Tahun 2026
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% penurunan 2024 - 2025	Target 2026	% Capaian Thd Target 2026
-	0,92	0,93	0,04	0,03	0,66	120	120	0,06	120

a. Capaian tahun 2025

Capaian PNBP pada triwulan I tahun 2026. sebesar Rp. 665.000.000,- melebihi target yang ditentukan pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp.60.000.000,- dengan persentase capaian 120%.

b. Capaian indikator dengan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I tahun 2025, terjadi kenaikan capaian cukup signifikan sebesar 120%. Pada Triwulan I Tahun 2025,

realisasi indikator tercatat sebesar 0,01 Miliar, sedangkan pada Triwulan I Tahun 2026 realisasi menurun menjadi 0,65 Miliar. Kenaikan capaian ini terutama dipengaruhi oleh adanya kerjasama pelatihan latsar cpns dari kemdiktisaintek dan kemenppa anggaran pada Tahun 2026,- pada Triwulan I Tahun 2026. Dengan demikian, meskipun secara persentase terhadap target tahun berjalan capaian indikator tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik (120%), kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya lebih mencerminkan perubahan kebijakan dan penyesuaian target.

Perbandingan Capaian Kinerja triwulan I Tahun 2026 dengan Target Renstra BPPA Sukamandi

Capaian kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker BDA Sukamandi pada Triwulan I tahun 2026 menunjukkan bahwa kinerja penerimaan telah mencapai target triwulan I yang telah ditetapkan. Target PNBP triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 0,033 miliar realisasi penerimaan mencapai Rp. 0,66 miliar atau sekitar 120% dari target triwulan I.

Kondisi ini menunjukkan adanya penguatan tata kelola layanan dan peningkatan efektivitas koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga. Capaian ini menjadi indikator positif atas upaya BPPA KKP dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara bukan pajak secara berkelanjutan, sekaligus menjadi dasar yang kuat untuk mendorong peningkatan target dan strategi pengelolaan PNBP pada tahun-tahun berikutnya agar kinerja pendapatan dapat terus tumbuh secara konsisten dan akuntabel.

c. Perbandingan Realisasi dengan UPT lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel 7 berikut.

Tabel 11. Perbandingan realisasi Nilai PNBP triwulan I Tahun 2026 dengan UPT Lingkup BPPSDMKP.

N o.	Nama Satker	Target (Milyar Rp)	Realisasi (Milyar Rp)	% Capaian Satker
1	BPPP Tegal	4,05	5,46	120,00
2	BPPP Banyuwangi	0,03	0,22	120,00

3	BPPP Bitung	0,06	0,25	120,00
4	BPPP Ambon	0,03	0,04	105,90
5	BPPA Sukamandi	0,03	0,66	120,00

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pelatihan menunjukkan variasi kinerja antar satker. BPPA Sukamandi mencatat realisasi penerimaan sebesar Rp. 0,66 miliar dari target Rp. 0,03 miliar, dengan capaian 120% dari target yang ditetapkan. Persentase capaian menunjukkan tingkat efektivitas yang sama tinggi dengan beberapa UPT lainnya yang juga mencapai lebih dari 100%, seperti BPPP Tegal, BPPP Bitung, dan BPPP Banyuwangi.

Sebagai perbandingan, BPPP Tegal menjadi satker dengan nilai PNBP terbesar, yaitu Rp. 5,46 miliar dari target Rp. 4,05 miliar (120%), diikuti oleh BPPP Banyuwangi dengan realisasi Rp. 0,22 miliar dari target Rp. 0,03 miliar (120%). Kinerja BPPA Sukamandi, menunjukkan bahwa strategi optimalisasi sumber pendapatan yang diterapkan berjalan efektif. Hal ini memperlihatkan komitmen BPPA Sukamandi dalam mendukung target penerimaan negara meskipun memiliki ruang lingkup kegiatan yang tidak sebesar UPT lainnya.

d. Analisis Keberhasilan / Faktor Pendukung

Keberhasilan pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPPA Sukamandi pada Triwulan I Tahun 2026, yang mencapai 120% dari target tahunan, tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung utama. Pertama, komitmen manajemen dan seluruh pegawai dalam mengoptimalkan sumber penerimaan yang ada menjadi salah satu faktor kunci. Dengan dukungan koordinasi yang baik antarbagian, pelaksanaan kegiatan pelatihan dan layanan penunjang mampu berjalan secara efektif meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran.

Kedua, optimalisasi kerja sama yang sudah ada dengan pihak-pihak tertentu tetap dapat dipertahankan, sehingga meskipun jumlah kesepakatan baru menurun, implementasi kerja sama yang sudah berjalan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan. Ketiga, efisiensi dalam pengelolaan biaya operasional serta pemanfaatan sumber daya internal secara maksimal mendukung keberhasilan pencapaian target, meskipun nominal target relatif kecil dibandingkan UPT lain.

Selain itu, keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh kualitas layanan pelatihan dan dukungan administrasi yang konsisten, yang menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan mitra dan peserta pelatihan. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut mencerminkan bahwa BPPA Sukamandi memiliki ketahanan dan adaptabilitas yang baik dalam menghadapi keterbatasan serta mampu tetap mencapai target yang telah ditetapkan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada BPPA Sukamandi selama Triwulan I Tahun 2026 menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan capaian PNBP meskipun dengan keterbatasan anggaran. Kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku mendorong unit kerja untuk lebih selektif dalam penggunaan dana dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Pengelolaan anggaran difokuskan pada kegiatan yang memberikan nilai tambah langsung, seperti pelatihan yang berbasis kebutuhan serta dukungan layanan yang memiliki potensi kontribusi terhadap penerimaan negara.

Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada dilakukan secara optimal dengan menerapkan prinsip *cost-effectiveness*, seperti meminimalkan biaya operasional melalui pengaturan jadwal pelatihan yang terintegrasi dan penggunaan sumber daya internal (tenaga pengajar dan fasilitas pelatihan) secara maksimal.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja BPPA Sukamandi pada Triwulan I Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang untuk memberikan kontribusi langsung terhadap target penerimaan serta peningkatan kualitas layanan. Salah satu program utama adalah pelatihan teknis dan manajerial yang diselenggarakan sesuai kebutuhan mitra dan stakeholder. Program ini tidak hanya mendukung pengembangan kompetensi aparatur dan pelaku sektor perikanan, tetapi juga menjadi sumber penerimaan melalui skema biaya pelatihan berbasis kerja sama.

Selain itu, penerapan program optimalisasi pemanfaatan fasilitas pelatihan yang meliputi ruang kelas, aula dan asrama, memberikan nilai

tambah karena memaksimalkan penggunaan aset yang ada untuk mendukung kegiatan internal maupun kerja sama eksternal. Kegiatan penguatan jejaring kerja sama dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan juga menjadi faktor penting, karena membuka peluang tambahan dalam pelaksanaan pelatihan bersama dan memperluas basis peserta pelatihan.

Upaya pendukung lainnya adalah digitalisasi layanan administrasi dan promosi program pelatihan, yang mempermudah akses informasi bagi calon peserta sekaligus meningkatkan citra profesional BPPA Sukamandi. Kombinasi dari kegiatan pelatihan unggulan, pemanfaatan aset, penguatan kerja sama, serta digitalisasi layanan telah memberikan dampak positif pada capaian kinerja, meskipun di tengah keterbatasan anggaran dan berkurangnya inisiasi kerja sama baru pada periode ini.

IKSK 02.01. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPA Sukamandi (%)

Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BPPA) KKP pada triwulan I tahun 2026 menetapkan indikator kinerja sasaran IKS 02.01 – Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan target sebesar 25%. Realisasi capaian mencapai 29,63%, atau 118,52% dari target yang telah ditetapkan.

Output indikator ini merupakan bagian dari Layanan Dukungan Manajemen Internal, yang mencakup layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan, layanan data dan informasi, layanan monitoring dan evaluasi (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, serta layanan perkantoran. Seluruh layanan tersebut dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPA KKP secara keseluruhan.

Jika dibandingkan dengan capaian periode sebelumnya, persentase kinerja pada triwulan I Tahun 2026 menunjukkan konsistensi dalam pemenuhan target. Pada triwulan I tahun 2025, capaian untuk indikator ini tercatat sebesar 120%, sedangkan pada tahun 2026 capaian dengan target yang sama tetap berada pada level 118,52%. Hal ini menunjukkan stabilitas dalam penyelenggaraan layanan dukungan manajemen internal, dengan bukti capaian berupa dokumen hasil layanan seperti laporan, matriks, dan tangkapan layar aplikasi yang telah disahkan oleh pimpinan satker.

Perbandingan capaian IKS ini dibandingkan dengan capaian periode yang lalu sebagai berikut (Tabel 12).

Tabel 12. Perbandingan capaian target IKSK. 02.01 dengan periode sebelumnya.

Realisasi TW I				Tahun 2026			% 2026	Tahun 2026	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2026	%Capaian
100	100	100	120	25	29,63	118,56	118,56	100	102.56

a. Capaian Triwulan I Tahun 2026

Pada Tahun 2026, capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKSK) 02.01 – Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BPPA Sukamandi mencapai 118,56%, sama dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%, atau setara dengan tingkat pencapaian 100%. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan layanan dukungan manajemen internal yang mencakup berbagai aspek, seperti layanan perencanaan dan penganggaran, layanan hukum, layanan tata kelola organisasi, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, monitoring dan evaluasi (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, serta layanan perkantoran.

b. Capaian Indikator dengan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian pada periode tahun sebelumnya , capaian indikator ini berada pada angka yang sama, yakni 118,56%. Dengan demikian, tidak terdapat selisih perubahan capaian atau 0,00%. Hal ini menunjukkan stabilitas kinerja dalam penyelenggaraan layanan dukungan manajemen internal, meskipun kondisi dan dinamika organisasi dapat berubah dari tahun ke tahun.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Target Renstra BPPA Sukamandi

Jika dibandingkan dengan target dalam dokumen Renstra BPPA Sukamandi, capaian kinerja tahun 2026 menunjukkan hasil yang memuaskan. Capaian 118,56% pada Tahun 2026 mencapai target triwulan I sebesar 118,56% dengan persentase capaian 118,56%. Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan layanan dukungan manajemen internal tidak hanya sesuai rencana, tetapi juga menunjukkan kesesuaian capaian yang memperkuat efektivitas tata kelola dan

dukungan manajerial yang diberikan BPPA Sukamandi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/Instansi Sejenis

Saat ini belum terdapat standar nasional yang secara spesifik mengukur persentase layanan dukungan manajemen internal sebagai indikator kinerja. Oleh karena itu, perbandingan dilakukan dengan capaian unit pelaksana teknis (UPT) lingkup BPPSDM KP sebagaimana pada tabel 13 berikut.

Tabel 13. Perbandingan realisasi Persentase layanan dukungan manajemen internal dengan UPT Lingkup BPPSDM KP.

No	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian Satker
1	BPPP Tegal	25	29,63	118,56
2	BPPP Banyuwangi	25	29,63	118,56
3	BPPP Bitung	25	29,63	118,56
4	BPPP Ambon	25	25,93	103,72
5	BPPP Medan	25	29,63	118,56
5	BPPA Sukamandi	25	29,63	118,56

Berdasarkan data, seluruh UPT telah mencapai target 118,56% yang ditetapkan. Capaian BPPA Sukamandi menunjukkan efektivitas pengelolaan manajemen internal yang dilakukan.

e. Analisis Keberhasilan / Faktor Pendukung

Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh beberapa faktor utama. Pertama, pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi berkala baik mingguan maupun triwulanan, yang memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana. Kedua, pelaksanaan pemantauan dan penyelesaian dokumen secara tepat waktu, sehingga target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Ketiga, penyusunan dokumen dan laporan dukungan manajerial yang lengkap dan terdokumentasi menjadi bukti capaian yang jelas dan terukur. Dukungan komitmen pimpinan serta koordinasi yang efektif antarbagian juga memperkuat pencapaian kinerja pada Tahun 2026.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Pelaksanaan layanan dukungan manajemen internal Tahun 2026 menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Optimalisasi penggunaan sumber daya dilakukan dengan memanfaatkan tenaga internal secara maksimal dan meminimalkan biaya tambahan, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mendukung penyusunan dokumen, laporan, dan koordinasi antarunit.

Efisiensi ini memungkinkan BPPA Sukamandi mencapai hasil yang melampaui target tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan capaian kinerja ini ditunjang oleh berbagai program dan kegiatan strategis, antara lain:

- 1) Rapat monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan semua rencana berjalan sesuai jadwal dan mengantisipasi potensi kendala.
- 2) Pemantauan dan penyelesaian dokumen secara sistematis yang memastikan seluruh target dokumen pendukung dapat dipenuhi tepat waktu.
- 3) Penyusunan laporan dukungan manajerial sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan kegiatan.
- 4) Penguatan sistem kerja internal yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia, tata kelola keuangan, dan dukungan perkantoran.

Program-program tersebut tidak hanya mendukung pencapaian target kinerja Tahun 2026, tetapi juga menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan manajerial BPPA Sukamandi di masa mendatang.

IKSK. 02.02. Indeks Profesionalitas ASN BPPA Sukamandi (indeks)

Indeks Profesionalitas merupakan ukuran yang menggambarkan kualitas profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Nilai ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan diukur setiap tahun untuk seluruh unit kerja pemerintah. Bagi Balai Diklat Aparatur (BPPA) Sukamandi, nilai Indeks Profesionalitas ASN menjadi indikator penting untuk mengetahui sejauh mana aparatur memiliki kompetensi dan dedikasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga secara optimal.

a. Capaian Triwulan I Tahun 2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKSK) 02.02 pada Triwulan I Tahun 2026 sedangkan realisasi yang akan dicapai pada Triwulan II Tahun 2026 Hasil

ini mengindikasikan bahwa ASN BPPA Sukamandi telah menunjukkan profesionalitas yang konsisten dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Capaian tersebut juga memperlihatkan efektivitas kebijakan pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan kompetensi yang diterapkan, sehingga indikator IKS 02.02 memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan pada akhir Tahun 2026.

IKSK 02.03. Penilaian Mandiri SAKIP BPPA Sukamandi (Nilai)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan pelaksanaan SAKIP adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai prasyarat terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya. SAKIP memberikan panduan yang jelas terkait proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pembuktian pencapaian tujuan organisasi yang valid dan terukur.

Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, BPPSDM menginisiasi metode pendampingan evaluasi SAKIP mandiri dan rekonsiliasi kinerja yang dilakukan secara berjenjang di seluruh satuan kerja lingkup KKP. Pendekatan ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap sistem akuntabilitas kinerja, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa inovasi melalui penerapan evaluasi berbasis aplikasi. Capaian pada triwulan I Tahun 2026, BPPA Sukamandi akan diukur pada triwulan IV Tahun 2026 dengan target tahun 2026 sebesar 83 .

IKSK 02.04. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPA Sukamandi (%)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPA Sukamandi mengukur tingkat komitmen pimpinan dan unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen). Indikator ini menjadi cerminan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), mengingat rekomendasi

pengawasan bertujuan memperbaiki proses bisnis dan kualitas layanan publik. Capaian Tahun 2025, mengacu pada Surat Sekretaris BPPSDM Nomor B.94/BPPSDM.1/RC.610/I/2026 tentang Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Tahun 2026, yang menyatakan bahwa BPPA Sukamandi telah menindaklanjuti seluruh temuan (100 %). Tabel capaian IKSK 02.04 tersaji pada tabel 16 berikut.

Tabel 14. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan.

Realisasi TW I				2026				Renstra BPPA KP 2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW I	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2025-2026	Target 2026	% Capaian thd target 2026
100	100	100	100	86	86	100	0	86	100

a. Capaian Triwulan I Tahun 2026

Pada Tahun 2026, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BPPA Sukamandi mencapai 100%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 86%. Capaian ini menunjukkan komitmen manajemen BPPA Sukamandi dalam mendukung penguatan tata kelola, khususnya melalui penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang cepat, tepat, dan menyeluruh.

b. Capaian Indikator dengan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, kinerja IKSK 02.04 pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kondisi yang stabil dan terjaga. Pada tahun 2025, persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti telah mencapai 100%, dan pada Triwulan I Tahun 2026 capaian tersebut tetap berada pada angka 100%. Dengan demikian, persentase kenaikan capaian antara tahun 2025 dan tahun 2026 tercatat 0%, yang menunjukkan tidak adanya perubahan secara kuantitatif karena indikator telah mencapai kondisi optimal sejak tahun sebelumnya.

Stabilitas capaian ini mencerminkan konsistensi BPPA dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu dan menyeluruh. Meskipun tidak terjadi peningkatan secara persentase, capaian tahun 2026 tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik karena mampu

mempertahankan tingkat kepatuhan dan efektivitas pengawasan internal pada level maksimal. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian dan tindak lanjut hasil pengawasan telah berjalan dengan baik dan berkelanjutan dari tahun ke tahun.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Renstra BPPA Sukamandi

Target BPPA Sukamandi Tahun 2026 untuk indikator ini ditetapkan sebesar 86%. Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian mencapai 100%, atau 100% dari target 2026. Hasil ini menegaskan keberhasilan BPPA Sukamandi dalam menjaga komitmen terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan mencerminkan efektivitas tata kelola internal yang dijalankan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/Instansi Sejenis

Belum terdapat standar nasional yang secara spesifik mengukur indikator ini. Oleh karena itu, perbandingan dilakukan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPSDM KP. Berdasarkan Tabel 16, beberapa satker seperti BPPP Tegal (100%), BPPP Banyuwangi (100%), BPPP Ambon (100%), BPPP Bitung (100%), dan BPPA Sukamandi (100%) sama-sama melampaui target 86%. BPPA Sukamandi mencatat capaian penuh 100%, sama dengan mayoritas UPT lainnya, menunjukkan konsistensi dan komitmen yang baik dalam mendukung tindak lanjut hasil pengawasan. Capaian masing-masing balai lingkup BPPSDMKP sebagai berikut (tabel 17).

Tabel 15. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BDA Sukamandi (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP.

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (%)	Realisasi Capaian Satker (%)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Tegal	86,00	100,00	100,00
2	BPPP Banyuwangi	86,00	100,00	100,00
3	BPPP Ambon	86,00	100,00	100,00
4	BPPP Bitung	86,00	100,00	100,00
5	BPPA KP	86,00	100,00	100,00

e. Analisis Keberhasilan / Faktor Pendukung

Keberhasilan capaian IKU ini tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung, antara lain:

1. Komitmen pimpinan dan pegawai dalam meminimalkan temuan serta mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan.
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan perbendaharaan yang tertib sehingga meminimalkan kesalahan yang berpotensi menjadi temuan.
3. Sistem pengawasan internal yang efektif, yang mendorong koordinasi cepat dan akurat dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Pencapaian target ini diperoleh melalui penggunaan sumber daya yang efisien. Tindak lanjut rekomendasi dilakukan dengan memanfaatkan tenaga internal dan sistem administrasi yang sudah ada, mengurangi kebutuhan sumber daya tambahan. Pemanfaatan rapat koordinasi daring, pemantauan dokumen secara elektronik, dan kolaborasi lintas bidang di internal BPPA Sukamandi mempercepat penyelesaian tindak lanjut dengan biaya minimal, tetapi tetap menjamin kualitas hasil yang optimal.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Sejumlah program mendukung capaian IKU ini, antara lain:

1. Pendampingan tindak lanjut temuan dengan melibatkan tim Inspektorat Jenderal serta pejabat terkait untuk memastikan rekomendasi diselesaikan sesuai tenggat waktu.
2. Peningkatan kualitas administrasi keuangan dan perbendaharaan melalui pelatihan internal serta penerapan sistem kerja berbasis aplikasi.
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan setiap dokumen tindak lanjut diselesaikan dengan baik dan terintegrasi dengan laporan keuangan serta kinerja.
4. Kolaborasi internal antarbidang yang memperkuat koordinasi dan mengurangi potensi terjadinya temuan pada periode berikutnya.

IKSK.02.05. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPA Sukamandi (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan instrumen penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah melalui proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka paket-paket pengadaan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat mengetahui rencana belanja pemerintah sejak awal tahun. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1), yang mengatur kewajiban setiap satuan kerja untuk mengumumkan RUP dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Pada Tahun 2026, BPPA Sukamandi berhasil mengumumkan seluruh RUP sesuai pagu pengadaan dengan tingkat capaian 100%, atau 120% dari target triwulan sebesar 77%. Hal ini menunjukkan kualitas perencanaan PBJ yang baik, komitmen pimpinan dan tim pengadaan untuk tepat waktu, serta kepatuhan terhadap regulasi pengadaan yang berlaku. Data capaian dan perbandingan dengan periode sebelumnya disajikan dalam tabel 22 berikut.

Tabel 16. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPA Sukamandi (%).

Realisasi TW I					2026				Renstra BPPA KP 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target TW I	Realisasi TW. I	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2026	% Capaian thd target 2026
-	-	-	-	100	77	100,00	120,00	-	77	120,00

a. Capaian Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP di BPPA Sukamandi mencapai 100%, melampaui target triwulan sebesar 77% dengan tingkat capaian 120%. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh paket pengadaan yang direncanakan telah diumumkan secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan hasil identifikasi belanja pengadaan yang terdampak

efisiensi sehingga paket yang tidak dapat direalisasikan tidak diinput dalam sistem SiRUP.

b. Capaian Indikator dengan Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada Tahun 2025, sehingga belum tersedia data pembandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 menjadi baseline awal bagi pengukuran kinerja indikator ini di tahun 2026.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Renstra BPPA Sukamandi

Target Renstra BPPA Sukamandi Tahun 2026 untuk indikator ini adalah 77%. Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 100%, yang berarti mencapai 120% dari target tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa BPPA Sukamandi memiliki kualitas perencanaan PBJ yang baik, disiplin dalam pelaksanaan penyusunan dan pengumuman RUP, serta kepatuhan penuh terhadap peraturan pengadaan barang dan jasa.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/Instansi Sejenis

Belum tersedia standar nasional yang secara spesifik dapat digunakan untuk membandingkan indikator ini. Oleh karena itu, perbandingan dilakukan dengan UPT lingkup BPPSDM KP. Berdasarkan data Triwulan I Tahun 2026, seluruh satuan kerja lingkup BPPSDM KP, termasuk BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Ambon, BPPP Bitung, BPPP Medan, dan BPPA Sukamandi, masing-masing mencapai 100% atau 120% dari target yang ditetapkan (Tabel 23). Hasil ini menunjukkan konsistensi kinerja antar-UPT dalam memastikan RUP diumumkan sesuai jadwal dan ketentuan.

Tabel 17. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPPSDMKP.

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (%)	Realisasi Capaian Satker (%)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Tegal	77,00	100,00	120,00
2	BPPP Banyuwangi	77,00	100,00	120,00
3	BPPP Ambon	77,00	100,00	120,00
4	BPPP Bitung	77,00	100,00	120,00
5	BPPP Medan	77,00	100,00	120,00
6	BPPA KP	77,00	100,00	120,00

e. Analisis Keberhasilan / Faktor Pendukung

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) PBJ yang diumumkan pada SIRUP di BPPA Sukamandi pada Triwulan I Tahun 2026 tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung yang saling terkait. Komitmen pimpinan dan tim pengadaan menjadi kunci utama dalam memastikan seluruh proses penyusunan dan pengumuman RUP dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Perencanaan kebutuhan barang dan jasa yang terintegrasi sejak awal tahun dari seluruh unit kerja juga berperan penting, karena memastikan semua paket pengadaan yang layak dan realistis dapat diinput dengan baik ke dalam sistem SIRUP. Kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi pengadaan barang/jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) semakin memperkuat tata kelola pengadaan di BPPA Sukamandi. Selain itu, kemampuan teknis dan penguasaan aplikasi SIRUP oleh para admin dan pejabat pengadaan menjadi faktor yang mendukung kecepatan serta akurasi input data, sehingga target pengumuman RUP dapat tercapai secara optimal.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Dari sisi efisiensi, pencapaian ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dikelola dengan baik. Pemanfaatan aplikasi SIRUP memungkinkan seluruh proses penginputan RUP dilakukan secara digital dan terpusat, sehingga mengurangi kebutuhan dokumentasi manual dan mempercepat alur kerja. Koordinasi lintas unit yang efektif membuat potensi keterlambatan atau duplikasi data dapat dihindari, sementara langkah identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam kertas kerja klarifikasi membantu memastikan RUP yang diumumkan sesuai dengan pagu yang telah disesuaikan dan tidak melebihi 100%. Pendekatan ini menunjukkan bahwa proses pengumuman RUP tidak hanya memenuhi target kinerja tetapi juga dilakukan dengan efisien dan akuntabel.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Sejumlah program dan kegiatan strategis turut mendukung keberhasilan ini. Sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai tata cara input RUP serta pemahaman regulasi terbaru memperkuat kapasitas admin dan pejabat

pengadaan dalam mengelola data. Penyusunan jadwal penyampaian RUP dari setiap unit kerja memastikan ketepatan waktu, sementara pembentukan tim koordinasi lintas bagian memfasilitasi pengawalan proses penyusunan dan pengungkahan RUP secara menyeluruh. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres input RUP memberikan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan berkelanjutan. Revisi RUP yang berbasis pada hasil klarifikasi efisiensi belanja juga berperan penting dalam menjaga proporsionalitas nilai pengumuman agar tidak melampaui pagu yang ditetapkan. Semua upaya ini membuktikan adanya sinergi yang kuat dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengadaan di BPPA Sukamandi.

IKSK 02.06. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPA Sukamandi (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon I diperoleh dari nilai unit kearsipan II.

Sejalan dengan amanat pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPSDM menginisiasi metode Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Capaian pada triwulan I Tahun 2026, BPPA Sukamandi akan diukur pada triwulan IV Tahun 2026 dengan target tahun 2026 sebesar 71 .

IKSK.02.07. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPA Sukamandi (Nilai)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BDA Sukamandi merupakan salah satu ukuran penting dalam pencapaian sasaran strategis terkait terpenuhinya layanan dukungan manajemen. Indikator ini berfungsi untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran melalui pemantauan tingkat penyerapan anggaran dan pencapaian output yang dihasilkan. Penilaian ini menjadi salah satu alat evaluasi kinerja belanja pemerintah dalam mendukung ketahanan fiskal dan efektivitas ekonomi, yang mengacu pada 12 indikator pelaksanaan anggaran, yaitu revisi DIPA, halaman III DIPA, pengelolaan Uang Persediaan (UP), rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, pengelolaan data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas, pengembalian SPM, dispensasi penyampaian SPM, dan pagu minus. Capaian IKSK.02.07. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPA Sukamandi (Nilai) akan diukur pada triwulan II Tahun 2026 dengan target tahun 2026 sebesar 83 .

IKSK 02.08. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPA Sukamandi (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas perencanaan dan pengelolaan anggaran suatu organisasi. Indikator ini menilai kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran dan output yang dihasilkan, sehingga menjadi tolok ukur

kualitas perencanaan dan implementasi program. Di BPPA Sukamandi, IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan bagian dari sasaran strategis “Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen” yang bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pengelolaan anggaran berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan hasil (*output-oriented*). Capaian IKSK 02.08.Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPA Sukamandi (Nilai) akan diukur capaiannya pada triwulan IV Tahunan 2026 dengan target tahun 2026 sebesar 71,5 .

BAB IV PENUTUP

1.1. Capaian Kinerja Utama

Pada Triwulan I Tahun 2026, Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BPPA) Sukamandi berhasil mencapai target kinerja dengan hasil yang istimewa. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 116,07, naik 1,07 poin dibandingkan capaian periode yang sama tahun 2025 sebesar 115,00% sehingga masuk kategori Istimewa (Biru).

Pada aspek output dan layanan utama, realisasi PNBP mencapai 120% dari target, yang mencerminkan efektivitas pengelolaan layanan dan peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan. Demikian pula pada pengembangan kompetensi aparatur, Jumlah aparatur KP yang dilatih mencapai 120% dari target, menandakan tingginya partisipasi aparatur KP serta keberhasilan transformasi pembelajaran berbasis digital dan fleksibel. Kinerja ini memperlihatkan bahwa BDA Sukamandi mampu merespons kebutuhan pengembangan SDM secara adaptif dan efisien.

Dari sisi tata kelola dan penguatan kelembagaan, capaian indikator juga menunjukkan hasil yang sangat positif. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPA Sukamandi mencapai 118,52% dari target, menggambarkan meningkatnya peran strategis BDA Sukamandi sebagai pusat layanan dukungan manajemen.

Secara terperinci capaian kinerja pada Tahun 2026 tersaji pada tabel 29 berikut.

Tabel 18. Capaian Kinerja BPPA Tahun TW I Tahun 2026.

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Target Apr	Capaian Apr	% Terhadap Capaian
SK.01. Aparatur Yang Dididik dan Dilatih						
IKSK.01.01	Persentase aparatur KKP yang menerapkan kompetensi hasil pelatihan di BPPA Sukamandi (%)	%	75			
IKSK.01.02	Jumlah aparatur KP yang dilatih (orang)	Orang	4.620	1000	1.298	120
IKSK.01.03	Naskah perangkat pelatihan Aparatur	Dokumen	1			

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Target Apr	Capaian Apr	% Terhadap Capaian
	Kelautan dan Perikanan (Dokumen)					
IKSK.01.04	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPA Sukamandi (Dokumen)	Dokumen	1			
IKSK.01.05	Tenaga Pelatihan yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi sesuai standar (Orang)	Orang	15			
IKSK.01.06	Jumlah Program Pembelajaran Berbasis Corporate University yang Dilaksanakan oleh BPPA Sukamandi (Program)	Program	7			
IKSK.01.07	Nilai PNPB Satker BPPA Sukamandi (Rupiah Miliar)	Rupiah Miliar	0,06	0,03	0,66	120
SK.02. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan						
IKSK.02.01	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPA Sukamandi (%)	%	100	25	29,63	118,52
IKSK.02.02	Indeks Profesionalitas ASN BPPA Sukamandi (indeks)	Indeks	83			
IKSK.02.03	Penilaian Mandiri SAKIP BPPA Sukamandi (Nilai)	Nilai	81			
IKSK.02.04	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPA Sukamandi (%)	%	86	86	86	100
IKSK.02.05	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPA Sukamandi (%)	%	77	77	100	120
IKSK.02.06	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPA Sukamandi (Nilai)	Nilai	71			
IKSK.02.07	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPA Sukamandi (Nilai)	Nilai	92			
IKSK.02.08	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPA Sukamandi (Nilai)	Nilai	71,5			

1.2. Permasalahan dan Rekomendasi

a. Permasalahan

Dalam proses pelaporan dan evaluasi kinerja, masih terdapat kendala pada kelengkapan serta penataan data dukung yang belum optimal. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam penyusunan laporan, potensi ketidaksesuaian informasi yang disajikan, serta berkurangnya efektivitas dalam proses evaluasi kinerja. Permasalahan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian data agar dapat mendukung pelaporan dan evaluasi kinerja secara lebih akurat, tepat waktu, dan akuntabel.

b. Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala kelengkapan dan penataan data dukung, direkomendasikan agar dilakukan penguatan sistem pengelolaan data melalui standarisasi format dan tata kelola yang jelas, pemanfaatan aplikasi atau sistem informasi untuk mendukung pengarsipan digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus terkait pengelolaan data dan dokumentasi. Selain itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin agar data dukung selalu diperbarui, tertata dengan baik, dan dapat mendukung penyusunan laporan serta evaluasi kinerja secara lebih akurat dan tepat waktu.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL brsdrm@kkp.go.id

**RENCANA KERJA TAHUN 2026
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **R Hernan Mahardhika**
Jabatan : Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiawati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan

Perikanan Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lilly Aprilya Pregiawati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur Sukamandi



Ditandatangani
Secara Elektronik

R Hernan Mahardhika

RENCANA KERJA TAHUN 2026
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	1	Persentase aparatur KKP yang menerapkan kompetensi hasil pelatihan di BPPA Sukamandi (%)	75
		2	Jumlah aparatur KP yang dilatih (orang)	4.620
		3	Naskah perangkat pelatihan Aparatur kelautan dan perikanan (Dokumen)	1
		4	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPA Sukamandi (Dokumen)	1
		5	Tenaga Pelatihan yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi sesuai standar (Orang)	15
		6	Jumlah Program Pembelajaran Berbasis Corporate University yang Dilaksanakan oleh BPPA Sukamandi (Program)	7
		7	Nilai PNBP Satker BPPA Sukamandi (Rupiah Miliar)	0,06
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPA Sukamandi (%)	100
		9	Indeks Profesionalitas ASN BPPA Sukamandi (indeks)	83
		10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPA Sukamandi (Nilai)	80
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPA Sukamandi (%)	86
		12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPA Sukamandi (%)	77
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPA Sukamandi (Nilai)	71
		14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPA Sukamandi (Nilai)	92
		15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPA Sukamandi (Nilai)	71,5

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	5.000.000.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8.429.809.000
Total Anggaran BPPA Sukamandi		13.429.809.000

Jakarta, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan PerikananDitandatangani
Secara Elektronik

Pihak Pertama

Kepala Balai Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur SukamandiDitandatangani
Secara Elektronik



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

JALAN RAYA 2 SUKAMANDI CIASEM SUBANG JAWA BARAT 41256

TELEPON (0260) 520996, FAKSIMILE (0260) 523364

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bdakip.sukamandi@kkp.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR B.207/BDA/PL.110/1/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian anggota tim yang ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan tentang Tim Pengelola Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

2

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1123);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 68/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 501);

Memberi Perintah

- Kepada : Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Surat Perintah Tugas Tentang Tim Pengelola Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Tahun 2026
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Balai ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. PENGARAH
Memberikan arahan dan bimbingan kepada penanggung jawab

dan pelaksana manajemen kinerja organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan.

2. **PENANGGUNG JAWAB**

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan manajemen kinerja organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan.

3. **PERENCANA**

- Menyusun dokumen perencanaan kinerja dengan pendekatan *Balance Score Card (BSC)*, meliputi Peta Strategis, Indikator Kinerja Utama, Target Pencapaian Kinerja serta Rencana Kegiatan dan Anggaran per Indikator Kinerja Utama;
- Melakukan input seluruh data perencanaan dan capaian kinerja dalam Aplikasi Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi;

4. **PENGUKUR KINERJA**

- Melakukan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen perencanaan kinerja serat Manual IKU secara periodik baik Triwulan (Interim LKj) dan Tahun (Tahunan LKj);
- Melakukan verifikasi data capaian kinerja;
- Menyiapkan data dukung/bukti hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama *Balance Score Card*;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengelola Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan.

KEEMPAT Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, akan dibebankan kepada Anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Kepala Balai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 22 Januari 2026
KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN APARATUR KP,



R. HERNAN MAHARDHIKA

LAMPIRAN SURAT PERINTAH TUGAS
 KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN APARATUR KELAUTAN
 DAN PERIKANAN
 NOMOR B.207/BDA/PL.110/I/2026
 TENTANG TIM PENGELOLA
 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH BALAI PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN APARATUR KELAUTAN
 DAN PERIKANAN TAHUN 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENGELOLA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
 KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	R. Hernan Mahardhika, S.St.Pi., M.M.	Kepala Balai	Pengarah
2.	Fajar Nugroho, S.Kel., M.Si.	Widyaiswara Ahli Muda	Perencana Kinerja
3.	Bunyamin Hamdani, A.Md., S.E.	Pranata Komputer Mahir	Pengukur Kinerja
4.	Andi Yusup, S.M.	Analisis Keuangan APBN	Pengukur Kinerja

Ditetapkan di Subang
 pada tanggal 22 Januari 2026
 KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN APARATUR KP,

 R. HERNAN MAHARDHIKA



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR**

JALAN RAYA 2 SUKAMANDI CIASSEM SUBANG JAWA BARAT 41256
TELEPON (0260) 520996, FAKSIMILE (0260) 523364
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bdakip.sukamandi@kkp.go.id

**SURAT PERINTAH TUGAS
KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR B.208/BDA/PL.110/I/2026**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026**

**KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Tahun 2026;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Tahun 2026;
 - c. Bahwa personil yang namanya tercantum di dalam lampiran Surat Perintah Tugas ini, dianggap mampu dan cakap untuk melakukan tugas yang dimaksud pada huruf a tersebut diatas;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 86/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan;
 - 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-

KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan;

Memberi Perintah

- Kepada : Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Surat Perintah Tugas Tim Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perintah Tugas ini
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- A. Penanggung Jawab
Bertanggungjawab atas Laporan Kinerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Tahun 2026;
 - B. Ketua
Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Tahun 2026;
 - C. Anggota
 - 1) Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis ;
 - 2) Menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
 - 3) Menyiapkan bahan Pengukuran Kinerja;
 - 4) Menyiapkan dan Mengelola Data Kinerja;
 - 5) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja;
 - 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan review dan evaluasi Kinerja;
- KETIGA : Masa Kerja Tim Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terhitung mulai sejak ditetapkannya Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan ini hingga 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan, dengan Surat Pengesahan nomor 032.12.2.653526/2025 tanggal 24 Nopember 2025.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 22 Januari 2026
KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN APARATUR KP,

R. HERNAN MAHARDHIKA

4

LAMPIRAN SURAT PERINTAH TUGAS
 KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN APARATUR KELAUTAN
 DAN PERIKANAN
 NOMOR B.208/BDA/PL.110/I/2026
 TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN
 KINERJA BALAI PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN APARATUR KELAUTAN
 DAN PERIKANAN TAHUN 2026

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN 2026**

No	Nama	Pangkat/Golongan	Kedudukan
1.	R. Hernan Mahardhika, S.St.Pi., M.M.	Pembina, IV/b	Penanggung Jawab
2.	Fajar Nugroho, S.Kel., M.Si.	Penata Tk. I, III/d	Anggota
3.	Bunyamin Hamdani, A.Md., S.E.	Penata Muda, III/a	Anggota
4.	Andi Yusup, S.M.	Pengatur Tk. I, II/d	Anggota
5.	Tasripin	Pengatur Tk. I, II/d	Anggota

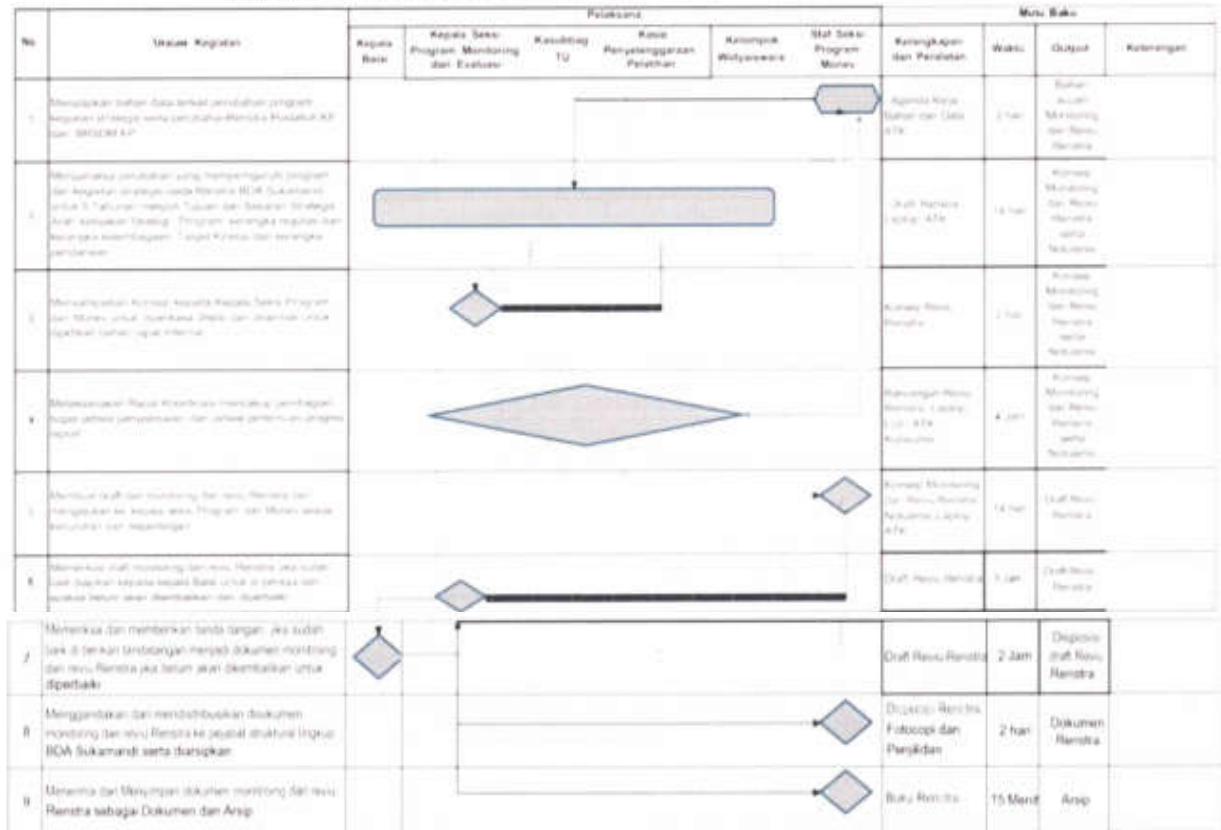
Ditetapkan di Subang
 pada tanggal 22 Januari 2026
 KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN APARATUR KP.



R. HERNAN MAHARDHIKA

LAMPIRAN SURAT PERINTAH TUGAS KEPALA BALAI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KELAUTAN DAN
PERIKANAN
NOMOR B.208/BDA/PL.110/I/2026
TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BALAI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING RENCANA STRATEGIS
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KELAUTAN DAN PERIKANAN



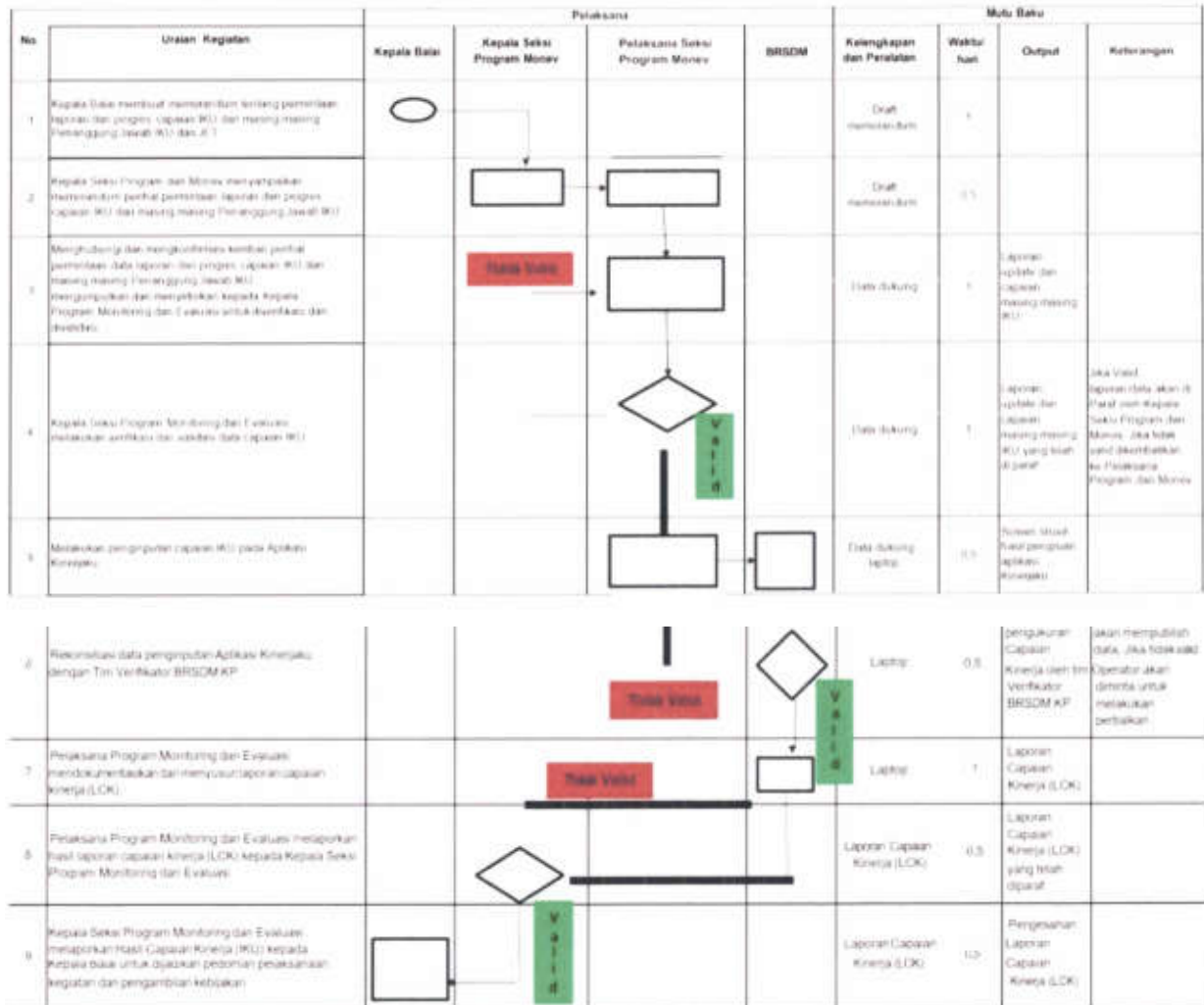
Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 22 Januari 2026
KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN APARATUR KP,



R. HERNAN MAHARDHIKA

LAMPIRAN SURAT PERINTAH TUGAS KEPALA BALAI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KELAUTAN DAN
PERIKANAN
NOMOR B.208/BDA/PL.110/I/2026
TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BALAI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2026

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026**



Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 22 Januari 2026
**KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN APARATUR KP,**



R. HERNAN MAHARDHIKA

9

LAMPIRAN SURAT PERINTAH TUGAS
 KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN APARATUR KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 NOMOR B.208/BDA/PL.110/I/2026
 TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN
 KINERJA BALAI PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN APARATUR KELAUTAN DAN
 PERIKANAN TAHUN 2026

**JADUAL MONITORING KINERJA
 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KELAUTAN DAN
 PERIKANAN TAHUN 2026**

No	JADWAL RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN	Bulan Ke -											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja (LKJ) per Tahun Anggaran												
2	Penyusunan Laporan Ringkas Kegiatan Pelatihan												
3	Penyampaian Laporan BDA Sukamandi TA. 2022												
4	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Sub Koord Moner TA. 2023												
5	Penyusunan Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Moner TA. 2023												
6	Koordinasi penyusunan dan Penerbitan SK Tim Moner TA.2023												
7	Penyusunan rencana aksi BDA Sukamandi TA. 2023												
8	Moner Kegiatan Pelatihan												
9	Review Kinerja												
10	Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan Capaian Kinerja (LCK)												
11	Pengumpulan bahan (bukti capaian) dan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) TW I – IV												
12	Review Rencana Strategis (Renstra)												
13	Updating Kinerjaaku												
14	Updating e-Monev Berpernas												
15	Updating Edahwas												
16	Updating Smart G2A												
17	Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan mingguan												
18	Rekonsiliasi Data Kinerja TW dengan Pelatihan KIP												
19	Pengumpulan Dokumen dan Data Dukung SAKIP												

[illegible]

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 22 Januari 2026
KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN APARATUR KP,

R. HERNAN MAHARDHIKA